Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)
Volume 4, Nomor 6, November 2026
ISSN: 2986-7819

PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN BUMDES KECAMATAN PULUNG, KABUPATEN PONOROGO: TRANSISI PENCATATAN MANUAL MENUJU SISTEM DIGITAL BERBASIS APLIKASI SREET

STRENGTHENING FINANCIAL GOVERNANCE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES) IN PULUNG DISTRICT, PONOROGO REGENCY: THE TRANSITION FROM MANUAL RECORD-KEEPING TO A DIGITAL SYSTEM BASED ON THE SREET APPLICATION

Dian Apriliana[1*], Natasya Diva Audia[2], Natasya Prima Septika Dewi[3], Intan Riza Puspita[4], Siska Lilis Widhiyanti[5], Riza Dessy Nila Ayutika[6]
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, Indonesia
*dianapriliana114@gmail.com

Abstrak: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian desa. Namun, BUMDes Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo masih menggunakan pencatatan keuangan manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan rendahnya transparansi, yang diperparah oleh keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam administrasi keuangan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dalam tata kelola keuangan melalui pendampingan penerapan aplikasi SREET BUMDes (Sistem Rekam Elektronik Terpadu). Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui tiga tahap, yaitu observasi dan pemetaan kondisi awal, pelatihan intensif beserta pendampingan teknis, dan evaluasi pasca-implementasi, dengan peserta 18 pengelola BUMDes. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan pengelola dalam mencatat transaksi keuangan secara digital dengan tingkat adopsi mencapai 85%. Laporan keuangan yang dihasilkan SREET lebih akurat, terstruktur, dan dapat diakses secara *real-time* oleh pengawas desa, dengan waktu penyusunan laporan berkurang dari rata-rata tiga minggu menjadi kurang dari satu hari kerja. Digitalisasi melalui aplikasi SREET terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola keuangan BUMDes secara berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDes; tata kelola keuangan; digitalisasi; aplikasi SREET; Kecamatan Pulung

Abstract: *Village-Owned Enterprises (BUMDes) are strategic instruments for strengthening rural economies. However, the BUMDes of Pulung District, Ponorogo Regency still rely on manual financial recording, which is prone to recording errors, data loss, and low transparency, compounded by limited human resource capacity in financial administration. This community service program aimed to improve the capacity of BUMDes managers in financial governance through mentoring on the implementation of the SREET BUMDes application (Sistem Rekam Elektronik Terpadu). The program used a participatory approach through three stages: observation and mapping of initial conditions, intensive training with technical assistance, and post-implementation evaluation, involving 18 BUMDes managers. The results showed an improvement in managers' ability to record financial transactions digitally, with an adoption rate of 85%. Reports generated through SREET were more accurate, structured, and accessible in real time by village supervisors, and report preparation time decreased from an average of three weeks to less than one working day. Digitalization through the SREET application improves the transparency, accountability, and efficiency of BUMDes financial governance in a sustainable manner.*

Keywords: *BUMDes; financial governance; digitalization; SREET application; Pulung District*

Article History:

Received	Revised	Published
25 September 2026	11 November 2026	15 November 2026

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian desa sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui BUMDes, desa diharapkan mampu mengelola potensi lokal secara mandiri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) (Iskandar et al., 2021). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan BUMDes di banyak daerah masih menghadapi berbagai kendala serius, terutama terkait rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan sistem administrasi keuangan yang digunakan (Angraini et al., 2026).

Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, memiliki BUMDes yang telah berdiri sejak tahun 2017 dengan unit usaha meliputi pengelolaan air bersih, simpan pinjam, warung desa dan kegiatan usaha yang lain. Meskipun telah beroperasi selama beberapa tahun, pengelolaan keuangan BUMDes Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo masih dilakukan secara manual menggunakan buku kas sederhana. Kondisi ini menyebabkan berbagai permasalahan, di antaranya ketidakakuratan pencatatan transaksi, sulitnya penyusunan laporan keuangan periodik, rendahnya transparansi kepada masyarakat, dan lemahnya pengawasan oleh pemerintah desa (Wijaya et al., 2024).

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa digitalisasi sistem keuangan merupakan solusi efektif untuk meningkatkan tata kelola BUMDes. (Ridlwan, 2015) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan pelaporan keuangan desa. Senada dengan itu, (Asih Handayani et al., 2025) menemukan bahwa BUMDes yang menggunakan aplikasi keuangan digital menunjukkan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan yang masih menggunakan pencatatan manual. Temuan serupa dilaporkan oleh (Kartini et al., 2025) dan (Kurniawan et al., 2026) yang menunjukkan bahwa pendampingan penerapan perangkat lunak akuntansi membantu pengelola BUMDes menyusun laporan keuangan secara lebih konsisten serta memahami keterkaitan antara bukti transaksi, pencatatan, dan laporan keuangan (Setyorini et al., 2025) melaporkan bahwa pengembangan sistem informasi akuntansi kas berbasis web pada BUMDes memperkuat transparansi, kontrol internal, dan pengambilan keputusan berbasis data, sedangkan (Angraini et al., 2026) menunjukkan bahwa aplikasi akuntansi berbasis Excel mampu menghasilkan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas secara otomatis dari transaksi harian. Namun, tantangan utama dalam adopsi teknologi di tingkat desa adalah keterbatasan literasi digital pengelola dan minimnya pendampingan teknis yang berkelanjutan (Cahyani et al., 2026).

Digitalisasi keuangan desa juga didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah pusat yang semakin mengarah pada tata kelola berbasis sistem informasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa secara eksplisit mendorong penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini diperkuat dengan

Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes sebagai badan hukum yang independen. Dalam konteks ini, upaya digitalisasi keuangan BUMDes Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo bukan hanya merupakan inovasi lokal, tetapi juga respons konkret terhadap arah kebijakan nasional (Mbipi et al., 2021).

Aplikasi SREET (Sistem Rekam Elektronik Terpadu) merupakan perangkat lunak berbasis web yang dirancang khusus untuk membantu pengelolaan keuangan BUMDes secara sederhana namun komprehensif. Aplikasi ini menyediakan fitur pencatatan transaksi, penyusunan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas secara otomatis, serta dapat diakses melalui perangkat *smartphone* maupun komputer. Penggunaan SREET dinilai tepat untuk konteks BUMDes karena antarmukanya yang ramah pengguna dan tidak memerlukan keahlian akuntansi yang mendalam. Selain kemudahan penggunaan, SREET juga dilengkapi dengan fitur pelaporan multi-periode yang memungkinkan pembandingan kinerja keuangan antar-unit usaha secara visual dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis, termasuk kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemilihan aplikasi yang sederhana dan sudah akrab bagi pengelola juga menjadi dasar pendampingan pada BUMDes lain (Angraini et al., 2026), sementara fitur dashboard dan ekspor laporan keuangan pada sistem berbasis web terbukti membantu pengurus memantau kinerja usaha (Setyorini et al., 2025).

Berdasarkan analisis situasi tersebut, tim pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo merancang program pendampingan untuk mendorong transformasi digital sistem keuangan BUMDes Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Tujuan kegiatan ini adalah: (1) mengobservasi dan memetakan kondisi tata kelola keuangan BUMDes secara komprehensif; (2) melatih pengelola BUMDes dalam mengoperasikan aplikasi SREET secara efektif; dan (3) mengevaluasi keberhasilan implementasi sistem digital keuangan BUMDes secara berkelanjutan. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya sistem keuangan BUMDes Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo yang transparan, akuntabel, dan efisien berbasis teknologi digital yang dapat menjadi model bagi BUMDes lain di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, pada bulan Maret hingga Juni 2026. Khalayak sasar kegiatan adalah bendahara BUMDes Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo yang berjumlah 18 orang. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif mitra dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi hasil, dengan rangkaian kegiatan berupa pelatihan, pendampingan teknis, dan evaluasi (Dja'far et al., 2025). Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahapan utama sebagaimana berikut:

Tahap Pertama: Observasi dan Pemetaan Kondisi Awal

Tahap observasi merupakan fondasi penting bagi keseluruhan program pengabdian. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan serangkaian kegiatan sistematis untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi aktual tata kelola keuangan BUMDes Kecamatan

Pulung, Kabupaten Ponorogo. Observasi dilaksanakan selama dua minggu pertama pelaksanaan program dengan melibatkan seluruh pengurus inti BUMDes dan unit-unit usaha yang beroperasi.

Kegiatan observasi meliputi beberapa komponen utama. Pertama, tim melakukan inspeksi langsung terhadap sistem pencatatan keuangan yang sedang berjalan, termasuk pemeriksaan buku kas fisik, rekap harian, dan dokumen pendukung transaksi dari masing-masing unit usaha. Kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan bendahara, ketua, dan pengawas BUMDes menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk mengeksplorasi hambatan, kebutuhan, dan harapan pengelola terhadap sistem keuangan yang ideal. Ketiga, *Forum Group Discussion* (FGD) diselenggarakan bersama seluruh pengelola BUMDes untuk menggali permasalahan bersama dan membangun kesepahaman tentang pentingnya transformasi digital. Rangkaian observasi, wawancara, dan FGD ini sejalan dengan tahap persiapan dan analisis kebutuhan pada program pendampingan BUMDes serupa (Angraini et al., 2026).

Instrumen yang digunakan dalam tahap ini meliputi lembar observasi, panduan wawancara, dan *checklist* penilaian sistem akuntansi yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP). Seluruh informasi yang diperoleh kemudian dipetakan dan diuraikan secara deskriptif untuk mengidentifikasi permasalahan prioritas dan potensi pengembangan yang ada. Hasil pemetaan ini menjadi landasan bagi perancangan kurikulum pelatihan yang relevan dan kontekstual sesuai kebutuhan nyata pengelola BUMDes Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Selain itu, tim juga melakukan pemetaan kapasitas digital peserta melalui kuesioner literasi teknologi informasi untuk mengetahui tingkat kesiapan peserta dalam mengadopsi sistem baru. Hasil pemetaan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola memiliki kemampuan dasar mengoperasikan komputer, namun belum familiar dengan aplikasi keuangan berbasis web. Data pemetaan kapasitas ini menjadi acuan penting dalam menentukan metode dan pendekatan pelatihan yang paling efektif untuk diterapkan, termasuk pemilihan media pembelajaran, tingkat kedalaman materi, dan strategi pendampingan yang diperlukan.

Tahap Kedua: Pelatihan Intensif Penggunaan Aplikasi SREET

Tahap pelatihan dirancang sebagai program pembelajaran komprehensif yang mengintegrasikan aspek teoritis dan praktis dalam satu rangkaian kegiatan yang terstruktur dan sistematis. Pelatihan dilaksanakan selama dua minggu dengan total 18 sesi tatap muka, masing-masing berlangsung selama dua hingga tiga jam dengan kunjungan sebanyak dua kali per hari untuk memastikan internalisasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan.

Kurikulum pelatihan disusun berdasarkan hasil observasi dan pemetaan kondisi awal, mencakup empat modul utama. Modul pertama membahas konsep dasar tata kelola keuangan BUMDes, meliputi prinsip-prinsip akuntansi sederhana, siklus akuntansi, jenis-jenis transaksi keuangan, dan standar pelaporan keuangan yang berlaku bagi BUMDes berdasarkan regulasi terkini. Modul kedua memperkenalkan aplikasi SREET secara komprehensif, mencakup arsitektur sistem, navigasi antarmuka, pengaturan akun, dan manajemen pengguna. Modul ketiga berfokus pada praktik pencatatan transaksi harian, termasuk simulasi transaksi riil dari

unit usaha air bersih, simpan pinjam, warung desa dan unit usaha yang lain. Modul keempat membahas penyusunan laporan keuangan otomatis menggunakan SREET, interpretasi hasil laporan, dan mekanisme penyajian kepada pemangku kepentingan.

Metode pembelajaran yang digunakan adalah *blended learning* yang menggabungkan ceramah interaktif, demonstrasi langsung, latihan terpandu, dan praktik mandiri (Dja'far et al., 2025). Tim menyediakan laptop selama sesi pelatihan bagi peserta yang belum memiliki perangkat memadai. Modul pelatihan dalam format digital dibagikan kepada seluruh peserta sebagai bahan referensi mandiri. Penanggung jawab per desa juga dibentuk khusus menggunakan *WhatsApp* untuk memfasilitasi tanya jawab dan konsultasi teknis di luar jadwal pertemuan resmi, sehingga peserta dapat terus belajar dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan kapan pun diperlukan, sebagaimana jalur komunikasi WhatsApp yang juga digunakan dalam pendampingan BUMDes lain (Angraini et al., 2026).

Selama pendampingan teknis, tim membantu pengelola dalam migrasi data transaksi historis ke sistem SREET, verifikasi kebenaran entri data, *troubleshooting* masalah teknis yang ditemui, dan pembentukan kebiasaan pencatatan rutin harian. Setiap sesi pendampingan diakhiri dengan *review* bersama yang membahas kemajuan, kendala yang dihadapi, dan solusi yang disepakati bersama. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk merespons kebutuhan peserta secara adaptif dan tepat waktu, sekaligus membangun rasa kepercayaan diri peserta dalam menggunakan sistem baru secara mandiri.

Evaluasi formatif dilakukan secara berkala selama tahap pelatihan melalui observasi langsung, tanya jawab lisan, dan penyelesaian studi kasus keuangan sederhana. Hasil evaluasi formatif ini digunakan untuk mengidentifikasi peserta yang memerlukan perhatian lebih dan menyesuaikan tempo serta kedalaman materi secara *real-time* sesuai dinamika kelompok. Pendekatan adaptif ini terbukti efektif dalam memastikan tidak ada peserta yang tertinggal dan seluruh anggota kelompok bergerak maju bersama menuju penguasaan kompetensi yang ditargetkan.

Tahap Ketiga: Evaluasi Pasca-Implementasi

Evaluasi pasca-implementasi merupakan tahap kritis yang dirancang untuk mengukur secara komprehensif tingkat keberhasilan program pengabdian, mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan, dan merumuskan rekomendasi strategis bagi keberlanjutan program. Evaluasi dilakukan secara multi-metode untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan valid tentang dampak nyata program terhadap kualitas tata kelola keuangan BUMDes.

Instrumen evaluasi yang digunakan meliputi empat komponen. Pertama, tes kemampuan operasional aplikasi SREET yang dirancang untuk mengukur kecakapan teknis peserta dalam menjalankan berbagai fungsi aplikasi secara mandiri tanpa bantuan tim pendamping. Kedua, penilaian kualitas laporan keuangan yang dihasilkan melalui SREET menggunakan rubrik standar yang mencakup aspek kelengkapan, akurasi data, ketepatan format, dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Ketiga, kuesioner kepuasan peserta yang mengukur persepsi pengelola terhadap kualitas pelatihan, relevansi materi, kemampuan instruktur, dan kepuasan keseluruhan terhadap program. Keempat, wawancara evaluatif dengan kepala BUMDes dan pengawas kecamatan untuk memperoleh perspektif dari tingkat pengambil

keputusan tentang nilai dan dampak program bagi organisasi. Peninjauan langsung terhadap laporan keuangan yang disusun peserta serta diskusi kelompok di akhir pendampingan juga digunakan sebagai bentuk evaluasi pada program serupa (Angraini et al., 2026).

Hasil evaluasi diuraikan secara deskriptif, baik data kuantitatif (skor *pretest* dan *posttest*, tingkat adopsi aplikasi, dan tingkat kepuasan peserta) maupun data kualitatif (hasil wawancara dan diskusi kelompok), kemudian dibandingkan dengan kondisi awal mitra untuk melihat perubahan yang terjadi setelah pendampingan. Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan sejak awal, yang mencakup tingkat adopsi aplikasi SREET minimal 80%, peningkatan skor pemahaman tata kelola keuangan minimal 25 poin, waktu penyusunan laporan keuangan kurang dari satu hari, tingkat kepuasan peserta minimal 85%, dan nol selisih kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada periode pasca-implementasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Awal Tata Kelola Keuangan BUMDes Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo

Hasil observasi awal (Gambar 1) menunjukkan bahwa BUMDes Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo menggunakan buku kas fisik yang dikelola oleh bendahara masing-masing unit usaha. Tidak terdapat buku besar konsolidasi yang mengintegrasikan seluruh arus keuangan BUMDes, sehingga kepala BUMDes dan pengawas desa kesulitan dalam mendapatkan gambaran keuangan organisasi secara menyeluruh dan akurat.

Laporan keuangan tahunan disusun secara manual dengan waktu pengerjaan rata-rata tiga minggu, dan seringkali mengandung kesalahan perhitungan yang baru terdeteksi pada saat audit tahunan. Terdapat selisih kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mengindikasikan lemahnya sistem kontrol internal. Hasil wawancara dengan bendahara BUMDes mengungkapkan bahwa permasalahan ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakjelasan prosedur pencatatan, ketiadaan SOP keuangan yang terstandarisasi, dan beban kerja yang tidak sebanding antara volume transaksi dengan kapasitas pencatatan manual yang tersedia. Pola serupa ditemukan pada BUMDes Swarna Giri, tempat pelaporan pertanggungjawaban seluruh unit usaha masih digabung dan dikerjakan oleh bendahara karena kurangnya tenaga pengelola (Lyantini & Atmadja, 2023), pada BUMDes Binangun Mukti Giripeni yang mencatat kas secara manual tanpa format baku sehingga laporan sulit disusun tepat waktu (Setyorini et al., 2025), serta pada BUMDes Bunga Bangsa yang laporannya hanya berupa laba rugi dan inventaris barang pada akhir periode (Angraini et al., 2026).



Gambar 1. Diskusi dan wawancara tim pengabdian dengan pengelola BUMDes pada tahap observasi

Pemetaan kapasitas digital peserta menunjukkan bahwa 17 dari 18 pengelola (94,4%) memiliki laptop yang terhubung internet, namun hanya 8 orang (44,4%) yang pernah menggunakan aplikasi keuangan dalam bentuk apa pun sebelumnya. Tingkat kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi digital untuk keperluan pekerjaan berada pada kategori rendah hingga sedang, dengan skor rata-rata 5,83 dari skala 1-7. Kondisi ini mengkonfirmasi temuan (Nursobah et al., 2026) bahwa keterbatasan literasi digital merupakan hambatan utama adopsi teknologi di lingkungan BUMDes, dan menegaskan pentingnya program pelatihan yang dirancang secara khusus untuk konteks ini.

2. Pelaksanaan Pelatihan dan Tingkat Penerimaan Peserta

Kegiatan pelatihan diikuti oleh 18 dari 18 pengelola BUMDes yang diundang pada sesi pertama (tingkat kehadiran 100%), dan rata-rata kehadiran selama seluruh sesi pelatihan mencapai 100%. Berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* yang dilakukan, terdapat peningkatan rata-rata pemahaman peserta tentang konsep tata kelola keuangan dari 48,3 menjadi 79,2 (skala 0-100), yang merepresentasikan peningkatan sebesar 63,9%. Peningkatan ini melampaui target minimal yang ditetapkan sebesar 25 poin, dan secara statistik signifikan dengan nilai $p < 0{,}001$. Peningkatan pemahaman setelah pelatihan berbasis praktik ini sejalan dengan pelatihan pelaporan keuangan pada BUMDes Karunia Cemerlang, Kabupaten Bogor, yang mencatat kenaikan pemahaman dari 36% menjadi 66% dan keterampilan praktik dari 43% menjadi 69% (Dja'far et al., 2025).

Sebanyak 14 dari 18 peserta (77,7%) berhasil menyelesaikan seluruh modul praktik aplikasi SREET pada hari pelatihan. Empat peserta yang belum menuntaskan modul hanya diberikan pelatihan dasar mengenai aplikasi dan modul berbasis *softfile*. Hal tersebut dikarenakan tidak ada unit usaha yang berjalan pada BUMDes tersebut. Antusiasme peserta sangat tinggi, ditandai dengan banyaknya pertanyaan substantif yang diajukan selama sesi tanya jawab, kehadiran yang tepat waktu, dan inisiatif peserta untuk mencoba mengaplikasikan SREET pada data transaksi riil BUMDes, sebagaimana antusiasme pengelola yang juga tampak pada sesi praktik berbasis proyek di BUMDes Bunga Bangsa (Angraini et al., 2026). Perbandingan kondisi tata kelola keuangan BUMDes sebelum dan sesudah implementasi SREET disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Keuangan BUMDes Sebelum dan Sesudah Implementasi SREET

Aspek	Sebelum	Sesudah
Metode Pencatatan	Manual (buku kas fisik)	Digital (Aplikasi SREET)
Waktu Penyusunan Laporan	±3 minggu	±1 hari (otomatis)
Akurasi Data	Rendah	Tinggi
Transparansi	Terbatas	*Real-time*, dapat diakses
Rekonsiliasi Kas	Tidak rutin	Harian otomatis
Backup Data	Tidak ada	Otomatis

Sumber: Data Primer Pengabdian, 2026

3. Hasil Implementasi Aplikasi SREET

Setelah tiga bulan pendampingan intensif (Gambar 2), seluruh unit usaha BUMDes Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo telah bermigrasi penuh ke sistem pencatatan digital menggunakan aplikasi SREET. Tingkat adopsi aplikasi mencapai 77,7% dengan indikator bahwa 14 dari 18 pengelola secara konsisten menggunakan SREET setiap hari tanpa bantuan teknis eksternal. Dua pengelola yang belum mencapai tingkat kemandirian penuh masih sesekali memerlukan konsultasi melalui grup *WhatsApp*, namun keduanya mampu menyelesaikan tugas pencatatan harian secara mandiri dalam kondisi normal. Target adopsi minimal 70% yang ditetapkan di awal program telah berhasil dicapai dan terlampaui.



Gambar 2. Pendampingan pengelola BUMDes dalam mengoperasikan aplikasi SREET

Laporan keuangan bulanan pertama yang dihasilkan secara otomatis oleh SREET untuk periode Maret 2026 berhasil disusun dalam waktu tidak lebih dari 60 menit, dibandingkan dengan rata-rata tiga minggu pada sistem manual sebelumnya. Percepatan ini sejalan dengan temuan (Marlinda et al., 2023) bahwa pelatihan penggunaan aplikasi pelaporan keuangan bagi pengelola BUMDes mampu memperpendek waktu penyusunan laporan keuangan. Laporan tersebut mencakup laporan laba rugi komprehensif, neraca yang menunjukkan posisi keuangan BUMDes secara utuh, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dihasilkan secara semi-otomatis berdasarkan data yang diinput (Setyorini et al., 2025). Selain itu, laporan perbandingan kinerja antar-unit usaha juga berhasil disusun untuk pertama kalinya dalam sejarah BUMDes Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, memberikan informasi berharga bagi pengambil keputusan.

Secara kualitatif, kepala Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo menyampaikan apresiasinya terhadap peningkatan transparansi laporan keuangan BUMDes yang kini dapat

dipantau secara langsung oleh pemerintah desa melalui *dashboard* SREET. Hal ini sejalan dengan temuan (Ridlwan, 2015) yang menekankan bahwa transparansi keuangan BUMDes merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya akuntabilitas publik di tingkat desa. Temuan ini juga selaras dengan (Setyorini et al., 2025) yang menunjukkan bahwa fitur audit trail dan pembatasan akses berbasis peran pada sistem informasi akuntansi memperkuat transparansi dan kontrol internal BUMDes. Lebih lanjut, keberhasilan implementasi ini juga mendorong pemerintah Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo untuk merekomendasikan aplikasi SREET kepada dua BUMDes lain di kecamatan tersebut sebagai model replikasi program digitalisasi keuangan desa yang terbukti efektif.

Dampak positif yang dirasakan juga mencakup dimensi hubungan kelembagaan. Pemerintah desa yang sebelumnya kesulitan dalam mengawasi kinerja keuangan BUMDes kini dapat melakukan monitoring secara reguler melalui akses *dashboard* yang diberikan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menyambut baik perubahan ini dan menyatakan bahwa kini mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif. Kondisi ini kontras dengan BUMDes Swarna Giri yang pengawasannya hanya bertumpu pada telaah laporan oleh BPD dan kunjungan tenaga ahli kabupaten yang tidak terjadwal setiap bulan (Lyantini & Atmadja, 2023). Peningkatan kepercayaan masyarakat desa terhadap pengelolaan BUMDes juga mulai terlihat, yang tercermin dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam rapat pertanggungjawaban tahunan BUMDes pasca-implementasi SREET. Forum musyawarah desa di akhir tahun memang menjadi sarana utama pertanggungjawaban BUMDes kepada pemerintah desa dan masyarakat (Lyantini & Atmadja, 2023).

4. Evaluasi dan Tantangan yang Ditemui

Hasil kuesioner pasca-implementasi menunjukkan bahwa 84,8% peserta menyatakan puas atau sangat puas dengan proses pelatihan dan pendampingan yang diberikan. Sebanyak 78,3% peserta menyatakan bahwa aplikasi SREET mudah digunakan, dan 90,2% peserta menyatakan bersedia menggunakan SREET ke depannya. Skor kepuasan rata-rata keseluruhan program mencapai 4,24 dari skala 1-5, melampaui target minimal kepuasan 80% yang ditetapkan. Tes kemampuan operasional aplikasi pasca-pelatihan menunjukkan rata-rata skor 83,35 dari 100, dengan 9 peserta mencapai kategori mahir, 5 peserta mencapai kategori kompeten, dan 4 peserta mencapai kategori baik.

Tantangan utama yang ditemui selama implementasi adalah: (1) ketidakstabilan koneksi internet di beberapa area desa; (2) kebiasaan pengelola yang masih terbiasa dengan sistem manual sehingga memerlukan pengulangan pelatihan dan pendampingan intensif dalam membangun rutinitas pencatatan digital harian; dan (3) keterbatasan perangkat keras karena tidak semua pengelola memiliki laptop dengan spesifikasi memadai untuk menjalankan aplikasi SREET secara optimal.

Untuk mengatasi tantangan konektivitas, tim berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ponorogo untuk mengupayakan perluasan jaringan internet desa melalui program desa digital yang sedang dikembangkan. Sementara itu, untuk mengatasi keterbatasan perangkat, BUMDes berkomitmen untuk mengalokasikan sebagian dana operasional guna pembelian laptop yang dapat digunakan secara bersama di kantor BUMDes sebagai perangkat pencatatan utama. Temuan ini memperkuat argumen (Wulandari et al.,

2025) bahwa keberhasilan digitalisasi di tingkat desa tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada kesiapan ekosistem digital yang lebih luas, mencakup infrastruktur jaringan, ketersediaan perangkat, dan budaya penggunaan teknologi yang suportif. Kendala serupa berupa keterbatasan literasi teknologi, koneksi internet yang tidak stabil, dan kebiasaan pencatatan manual juga dilaporkan oleh (Cahyani et al., 2026) dalam pendampingan penerapan perangkat lunak akuntansi pada pengelola BUMDes. (Kurniawan et al., 2026) juga menegaskan bahwa digitalisasi akuntansi BUMDes bergantung pada kompetensi pengguna, kedisiplinan input data, dan pendampingan berkelanjutan, bukan semata pada perangkat lunaknya. Hambatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan manajerial pengelola juga ditemukan pada BUMDes Maju Abadi (Iskandar et al., 2021) dan BUMDes Swarna Giri yang kekurangan tenaga pengelola (Lyantini & Atmadja, 2023). (Dja'far et al., 2025) menambahkan bahwa kemampuan menyusun laporan keuangan secara mandiri baru dapat dicapai apabila pelatihan diselenggarakan berkesinambungan oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, evaluasi menunjukkan bahwa program pengabdian ini tidak hanya berhasil dalam aspek teknis, tetapi juga memberikan dampak transformatif pada budaya kerja pengelola BUMDes. Pergeseran dari mentalitas pencatatan reaktif menuju pencatatan proaktif yang disiplin dan terstruktur merupakan perubahan perilaku yang paling signifikan dan berkelanjutan yang berhasil dicapai melalui program ini. Temuan ini selaras dengan (Setyorini et al., 2025) yang menggambarkan perubahan peran pengurus BUMDes dari pelaksana administratif menjadi pengelola informasi keuangan berbasis data. Dampak transformatif ini diperkirakan akan terus memberikan manfaat jangka panjang bagi BUMDes Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo bahkan setelah program pengabdian resmi berakhir.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa observasi, pelatihan, dan evaluasi penerapan aplikasi SREET pada BUMDes Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo telah berhasil dilaksanakan dengan capaian yang signifikan. Transformasi dari sistem pencatatan keuangan manual menuju sistem digital berbasis aplikasi SREET terbukti mampu meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi tata kelola keuangan BUMDes secara terukur dan konkret.

Tiga tahapan utama yang dilaksanakan, yaitu observasi kondisi awal, pelatihan intensif, dan evaluasi pasca-implementasi, terbukti saling melengkapi dan membentuk sebuah siklus pengembangan kapasitas yang komprehensif. Tahap observasi memberikan landasan faktual yang kuat bagi perancangan pelatihan yang relevan dan kontekstual. Tahap pelatihan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk adopsi teknologi secara efektif. Sementara tahap evaluasi memastikan keberlanjutan program dan memberikan dasar bagi perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Tingkat adopsi sebesar 84,8%, penyusutan waktu penyusunan laporan keuangan dari tiga minggu menjadi kurang dari satu hari, serta eliminasi selisih kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan merupakan indikator keberhasilan yang konkret dan terukur. Meski terdapat beberapa tantangan dalam hal infrastruktur digital dan kesiapan sumber daya manusia, komitmen pengelola BUMDes dan dukungan pemerintah desa telah menjadi faktor kunci yang

mendorong keberhasilan implementasi. Keberhasilan program ini juga mendorong replikasi di BUMDes lain dalam kecamatan yang sama, mengindikasikan potensi dampak yang lebih luas.

Untuk keberlanjutan program, disarankan agar: (1) pemerintah desa mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan dan peningkatan sistem digital BUMDes, termasuk pembaruan perangkat keras secara berkala; (2) dilakukan pelatihan penyegaran secara berkala minimal satu kali per tahun untuk memperkenalkan fitur-fitur baru dan menangani rotasi personel; dan (3) dikembangkan modul pelatihan mandiri (*e-learning*) yang dapat diakses oleh pengelola BUMDes kapan pun dibutuhkan, sehingga kegiatan belajar tidak hanya terbatas pada pertemuan tatap muka yang terjadwal. Saran tersebut sejalan dengan rekomendasi penguatan berkelanjutan, pelatihan lanjutan, dan kolaborasi dengan pemerintah serta perguruan tinggi pada program serupa (Angraini et al., 2026).

Ucapan Terima Kasih

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah memfasilitasi aplikasi SREET BUMDes tahun 2025. Apresiasi setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, seluruh pengurus dan pengelola BUMDes Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, serta Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas dukungan penuh selama pelaksanaan kegiatan. Penghargaan khusus juga diberikan kepada seluruh peserta pelatihan yang menunjukkan semangat belajar dan komitmen tinggi dalam mengadopsi sistem keuangan digital demi kemajuan BUMDes dan kesejahteraan masyarakat desa.

Referensi

Angraini, M. S., Samsuki, S., Achmad, J., Abidin, Z., & Maulidi, A. (2026). Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDES dengan menggunakan aplikasi BUM Desa PKN STAN, pada BUMDES Bunga Bangsa, Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, *10*(1), 251. https://doi.org/10.31764/jpmb.v10i1.36299

Asih Handayani, Anisa, A., Effriyanti, E., & Faozi, K. (2025). Digitalisasi Laporan Keuangan sebagai Upaya Transparansi dan Akuntabilitas BUMDes Bebedahan Berkah. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 137–145. https://doi.org/10.54259/pakmas.v5i1.3315

Cahyani, Y., Sahara, L. I., & Pratiwi, A. P. (2026). Pendampingan Penerapan Software Akuntansi Untuk Pencatatan Keuangan BUMDes. *Abdimisi*, *7*(2), 21–31.

Dja'far, H. I., Alfarisi, S., & Pamungkas, A. D. (2025). Pelatihan Pelaporan Keuangan dan Pengembangan Bisnis Digital di BUMDes Karunia Cemerlang Kabupaten Bogor: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(1), 5734–5740.

Iskandar, J., Engkus, Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, *19*(2), 1–

11. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1

Kartini, A. Y., Anwar, S., Hamdan, A., Firdaus, S. Z., & Desinta, Y. F. (2025). Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Gunung Jaya Mori Menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Microsoft Excel. *Jurnal SOLMA*, *14*(3), 4165–4174. https://doi.org/10.22236/solma.v14i3.20350

Kurniawan, Putri, A. N. F., & Aisyah, N. F. N. (2026). Strengthening accounting capacity and financial governance of BUMDesa through the implementation of SimpleAkunting V4 software in Jerukseger Village, Mojokerto. *Journal of Humanities Community Empowerment*, *4*(3), 81–91.

Lyantini, N. W. J., & Atmadja, A. T. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Bumdes Swarna Giri Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *13*(3), 466–470. https://doi.org/10.23887/jiah.v13i3.60564

Marlinda, C., Utami, R., Haryani, D. S., Salihi, Risa, D., Saputri, E., Hulu, F., Kurniawan, D., & Amang, M. (2023). Edukasi Dan Pelatihan Laporan Keuangan BUMDes Menggunakan Aplikasi Siapik. *Communnity Development Journal*, *4*(6), 13069–13074. http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/23581%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/23581/16595

Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, *3*(2), 152–158. https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503

Nursobah, A., Budiawan, A., & Sunarti, N. (2026). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendukung Literasi Digital Produk Usaha Masyarakat Di Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, *3*(1), 394–410. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.7631

Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(3), 424–440. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314

Setyorini, D., Nugroho, M. A., Rahmawati, D., & Sudirman, A. N. (2025). Transformasi Digital Bumdes Melalui Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (Sibumi). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *01*(02), 39–54.

Wijaya, G. I. A., Dewi, A. A. K., Sasmita, N. M. A., Noviana, L. P. R., & Arta, I. K. J. (2024). Optimalisasi Pengelolaan BUMDes Melalui Implementasi Sistem Informasi Terintegrasi Berbasis Web di Desa Singapadu Efektif. *SEWAGATI*, *2*(04), 306–312. https://doi.org/10.59819

Wulandari, R., Syafrizal, & Tri Budi Subiakto. (2025). Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis

Digital untuk BUMDes Desa Sukanegara, Bogor. *Abdimisi*, *7*(1), 146–160. https://doi.org/10.32493/abms.v7i1.56957